



**PERANAN ETIKA PUBLIK DALAM MEMINIMALISASI TINDAKAN
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (*ABUSE OF POWER*) DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Untu Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Filsafat

OLEH:

GEDOFRIDUS AMBUT

NPM: 21.75.7074

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2025

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Gedofridus Ambut
2. NPM : 21.75.7074
3. Judul : Peranan Etika Publik dalam Meminimalisasi Tindakan
Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) di Indonesia

4. Pembimbing:

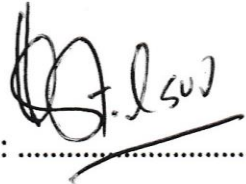
1. Fransiskus Ceunfin, Drs., Lic
(Penanggung Jawab)

: 

2. Dr. Bernardus Subang Hayong

: 

3. Dr. Antonius Bastian Nerlimah Limahekin

: 

5. Tanggal diterima

: 16 Februari 2024

6. Mengesahkan

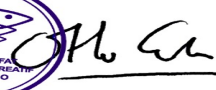
7. Mengetahui

Wakil Rektor

Rektor IFTK Ledalero



Dr. Yosef Keladu

Dr. Oto Gusti Ndegong Madung

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

11 Juni 2025

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

Rektor



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Fransiskus Ceunfin, Drs., Lic
2. Dr. Bernardus Subang Hayong
3. Dr. Antonius Bastian Nerlimah Limahekin

.....
.....
.....

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gedofridus Ambut

NPM : 21.75.7074

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Peranan Etika Publik dalam Meminimalisasi Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) di Indonesia** merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 11 Juni 2025

Yang menyatakan



Gedofridus Ambut

HALAMAN PERNAYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gedofridua Ambut

NPM : 21.75.7074

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Peranan Etika Publik dalam Meminimalisasi Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) di Indonesia**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyertaan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : IFTK Ledalero

Pada tanggal : 11 Juni 2025

Yang menyatakan



Gedofridus Ambut

KATA PENGANTAR

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan salah satu problem yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Fenomena ini dapat kita lihat dari beberapa dekade terakhir ini, di mana ada oknum-oknum pejabat publik tanah air yang terjerat kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Beragam bentuk kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan antara lain adalah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan manipulasi hukum. Kasus-kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menyikapi problem tersebut, berbagai upaya pun telah dilakukan bangsa Indonesia. Namun, dalam realitas tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik di tanah ari ini tidak pernah jera. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menghadirkan etika publik sebagai upaya yang berperan penting untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini mendapat kontribusi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pertama-pertama penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan cinta-Nya yang dicurahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. Terima kasih juga kepada Fransiskus Ceunfin, Drs., Lic yang telah membimbing, mengarahkan, mengoreksi dan membantu penulis dengan sabar dan rendah hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Bernardus Subang Hayong selaku dosen penguji dan sekaligus memberikan masukan, koreksi dan kritikan untuk perbaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Antonius Bastian Nerlimah Limahekin yang telah bersedia menjadi dosen penguji ketiga.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada *Scalabrinian Congregation* Maumere yang telah memberikan banyak hal bagi penulis dalam proses perkuliahan sejak dari tingkat satu hingga sampai pada tahap akhir perkuliahan di IFTK Ledalero terutama di dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga secara khusus penulis sampaikan kepada Pater Yopi Sadipun, CS, Pater Hau, CS dan Broth. Cuu, CS yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada para karyawan dan karyawan yang selalu mendukung penulis dengan berbagai motivasi yang menguatkan. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan “**congoroyo20**” (Lucky, Safry, Jell, Pais, Daniel, Fiky, Rinus, Claf, Arel, Ari, Arsen, Asmin, Arka, Sav, Nardo, Fulgen, Ovan, Bernad, Nusi, Rolis, Epin, Anton, dan Ansy) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman tingkat tiga, dua, dan satu yang selalu memberikan semangat.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap anggota keluarga, secara khusus kedua orang tua, Bapak Rofinus Jalu dan Mama Berta Ganung yang selalu membimbing, memotivasi dan mendidik penulis dengan nilai-nilai spiritual dan sosial sejak dini hingga saat ini. Melalui nilai-nilai tersebut penulis sangat terbantu di dalam usaha untuk meraih kesuksesan terutama dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada kakak Ronald Jeramu, Selvi Imul, dan adik Jefri Petong yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan, keterbatasan dan kekurangan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritikan dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk membantu menyempurnakan skripsi ini.

Scalabrinian, 11 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Gedofridus Ambut. 21.75.7074. ***Peranan Etika Publik dalam Meminimalisasi Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) di Indonesia***. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan konsep etika publik dan realitas tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Indonesia; (2) mendeskripsikan dan menjelaskan peranan etika publik dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Indonesia.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah konsep mengenai etika publik dan peranannya dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia merupakan problem kronis yang tidak pernah usai hingga dewasa ini. Banyak keputusan, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pejabat publik di Indonesia yang bertentangan dengan kepentingan umum. Mereka menggunakan kekuasaan hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu saja. Dengan melihat fenomena ini, maka diperlukan peranan etika publik sebagai upaya untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Etika publik merupakan pedoman moral bagi para pejabat publik dalam mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan yang bersih, jujur, adil, tanggungjawab dan bebas dari berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Etika publik akan mendorong para pejabat publik untuk selalu memperjuangkan kepentingan publik dalam setiap keputusan, kebijakan dan tindakan yang mereka ambil. Ada beberapa peranan etika publik dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia yakni; *Pertama*, menjamin efektivitas pelayanan publik dengan menyusun standar pelayanan publik dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik. *Kedua*, meningkatkan integritas pejabat publik melalui pelatihan etika dan penerapan kode etik. *Ketiga*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Kata Kunci: Etika Publik, Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Peranan Etika Publik

ABSTRACT

Gedofridus Ambut. 21.75.7074. ***The Role of Public Ethics in Minimizing Abuse of Power in Indonesia***. Thesis. Bachelor's Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2025.

This research aims to (1) describe and explain the concept of public ethics and the reality of acts of abuse of power in Indonesia; (2) describe and explain the role of public ethics in minimizing acts of abuse of power in Indonesia.

The method used in this study is qualitative descriptive. The object of study is the concept of public ethics and its role in minimizing acts of abuse of power in Indonesia. Based on the results of the study, it is concluded that acts of abuse of power in Indonesia are a chronic problem that has never ended until today. Many decisions, policies and actions taken by public officials in Indonesia are contrary to the public interest. They use power only to fight for personal interests and certain groups. By looking at this phenomenon, the role of public ethics is needed as an effort to minimize acts of abuse of power in Indonesia.

Public ethics is a moral guideline for public officials in realizing the administration of power that is clean, honest, fair, responsible and free from various forms of abuse of power. Public ethics will encourage public officials to always fight for the public interest in every decision, policy and action they take. There are several roles of public ethics in minimizing acts of abuse of power in Indonesia, namely; *First*, ensuring the effectiveness of public services by compiling public service standards and implementing public service principles. *Second*, improving the integrity of public officials through ethics training and the implementation of the code of ethics. *Third*, increasing transparency and accountability in the administration of power.

Keywords: Public Ethics, Acts of Abuse of Power and the Role of Public Ethics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.3.1 Tujuan Khusus	8
1.3.2 Tujuan Umum	8
1.4 Metode Penulisan	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II MEMAHAMI ETIKA PUBLIK	
DAN RUANG LINGKUPNYA.....	11
2.1 Sekilas Mengenai Etika.....	11
2.1.1 Pengertian Etika	11
2.1.2 Etika dan Moral	14
2.2 Publik.....	16
2.3 Etika Publik dan Ruang Lingkupnya.....	18
2.3.1 Pengertian Etika Publik	18
2.3.2 Dimensi Etika Publik	20
2.3.2.1 Tujuan.....	20
2.3.2.2 Modalitas	21
2.3.2.3 Tindakan	23

2.3.3 Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi.....	25
2.3.4 Nilai-Nilai Dasar Etika Publik.....	26
2.3.5 Maksud dan Tujuan Etika Publik.....	27
2.4 Kesimpulan.....	28
BAB III FENOMENA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN	
(ABUSE OF POWER) DI INDONESIA.....	29
3.1 Konsep Penyelenggaraan Kekuasaan di Indonesia Secara Umum	29
3.1.1 Pengertian Kekuasaan	29
3.1.2 Sistem Kekuasaan di Indonesia	32
3.1.2.1 Kekuasaan Legislatif	33
3.1.2.2 Kekuasaan Eksekutif	34
3.1.2.3 Kekuasaan Yudikatif	35
3.2 Fenomena Penyalahgunaan Kekuasaan (<i>Abuse of Power</i>)	
di Indonesia	36
3.2.1 Pengertian <i>Abuse of Power</i>	36
3.2.2 Bentuk-Bentuk <i>Abuse of Power</i> di Indonesia.....	38
3.2.2.1 Korupsi	38
3.2.2.2 Kolusi	40
3.2.2.3 Nepotisme	41
3.2.2.4 Manipulasi Hukum	43
3.2.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan <i>Abuse of Power</i> di Indonesia.....	44
3.2.3.1 Kekuasaan Tidak Bisa Dikendalikan	44
3.2.3.2 Lemahnya Penegakan Hukum	45
3.2.3.3 Kurangnya Komitmen Moral Pelaku	46
3.2.4 Dampak-Dampak <i>Abuse of Power</i> di Indonesia	47
3.2.4.1 Buruknya Kualitas Pelayanan Publik.....	47
3.2.4.2 Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.....	49
3.2.4.3 Ketidakadilan Sosial.....	50
3.3 Kesimpulan.....	51

BAB IV PERANAN ETIKA PUBLIK DALAM	
MEMINIMALISASI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN	
KEKUASAAN (<i>ABUSE OF POWER</i>) DI INDONESIA	52
4.1 Etika Publik dalam Penyelenggaraan Kekuasaan di Indonesia.....	52
4.1.1 Internalisasi Prinsip-Prinsip Etika Publik dalam	
Penyelenggaraan Kekuasaan	52
4.1.1.1 Integritas (<i>Integrity</i>)	53
4.1.1.2 Transparansi (<i>Transparency</i>)	54
4.1.1.3 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	55
4.1.1.4 Keadilan (<i>Justice</i>).....	56
4.2 Peranan Etika Publik dalam Meminimalisasi Tindakan	
 Penyalahgunaan Kekuasaan (<i>Abuse of Power</i>) di Indonesia	56
4.2.1 Menjamin Efektivitas Pelayanan Publik	56
4.2.1.1 Menyusun Standar Pelayanan Publik	58
4.2.1.2 Mengimplementasi Prinsip-prinsip Pelayanan Publik	60
4.2.2 Meningkatkan Integritas Pejabat Publik.....	61
4.2.2.1 Memberikan Pendidikan Etika	63
4.2.2.2 Penerapan Kode Etik	65
4.2.3 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	66
4.2.3.1 Pemanfaatan <i>E-government</i>	68
4.2.3.2 Partisipasi Publik	69
4.3 Kesimpulan	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Usul-Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77